



**RINGKASAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

**TAHUN 2023**



## **PENJABAT BUPATI KAMPAR**

**HAMBALI, SE., MBA., MH**

**Assalamualaikum Wr Wb**

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Kampar yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023.

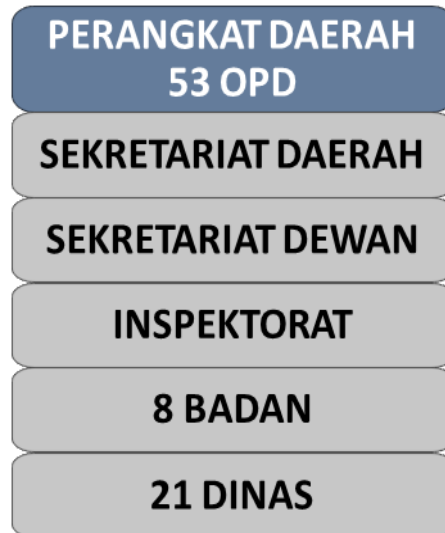
Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari kewajiban kami sebagai Bupati Kampar kepada masyarakat Kabupaten Kampar serta merupakan tanggung jawab pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kampar terkait erat dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Kampar. Visi Pembangunan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan Visi Kabupaten Kampar dan tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023, yaitu : **“Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”**.

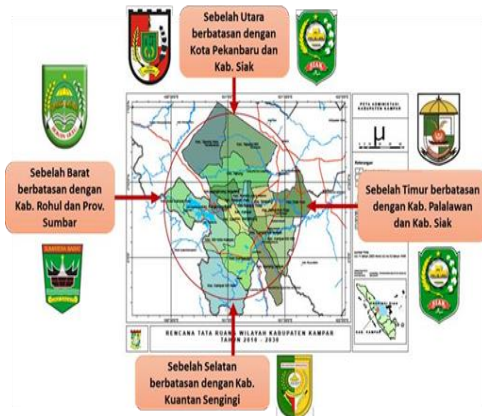
Penjabaran Visi tersebut sebagai berikut :

- PUSAT AGRIBISNIS
  - a. Mewujudkan penataan kepemilikan lahan serta pengembangan SDM dan teknologi dalam pembangunan agro industri dan agro bisnis.
  - b. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasana daerah sebagai pusat agribisnis.
  - c. Terwujudnya manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan profesional.
- BERBUDAYA
  - a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai Kabupaten Kampar yang agamis ke dalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
  - b. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong.
  - c. Memasyarakatkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik.
- SEJAHTERA
  - a. Terpenuhinya hak dasar masyarakat
  - b. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai.

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR



Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai dengan 00° 27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" sampai dengan 101° 14'30" Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

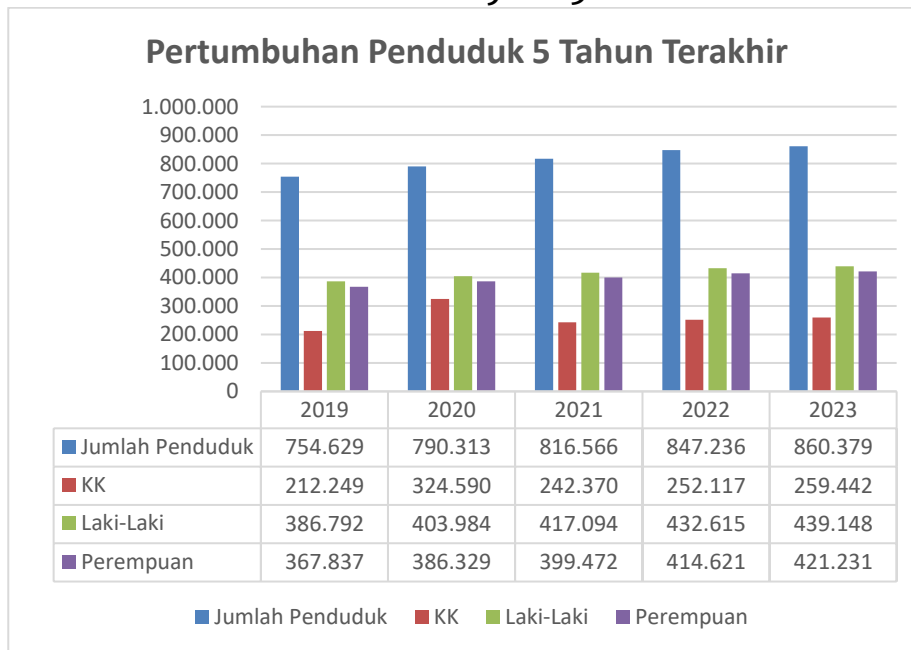


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.

## Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar



### Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2019 - 2023



## Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kampar Tahun 2023

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	91.533	8,1	1	19
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	130.125	11,5	-	24
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	75.974	6,7	1	7
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	33.059	2,9	-	11
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	59.797	5,3	-	9
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	73.240	6,5	1	12
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	67.400	6,0	-	6
8	Kuok	Kuok	15.141	1,3	-	9
9	Salo	Salo	20.783	1,8	-	6
10	Tapung	Patapahan	136.597	12,1	-	25
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	116.915	10,4	-	14
12	Tapung Hilir	Kota Garo	101.356	9,0	-	16
13	Bangkinang Kota	Bangkinang	17.718	1,6	2	2
14	Bangkinang	Muara Uwai	25.350	2,2	2	7
15	Kampar	Air Tiris	13.628	1,2	1	17
16	Kampar Timur	Kampar	17.308	1,5	-	9
17	Rumbio Jaya	Teratak	7.692	0,7	-	7
18	Kampar Utara	Sawah	7.984	0,7	-	8
19	Tambang	Sungai Pinang	37.194	3,3	-	17
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	68.980	6,1	-	12
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	11.154	1,0	-	5
<b>Jumlah</b>			<b>1.128.928</b>	<b>100,00</b>	<b>8</b>	<b>242</b>

## JUMLAH PNS KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2023 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, dengan ringkasan sebagai berikut :

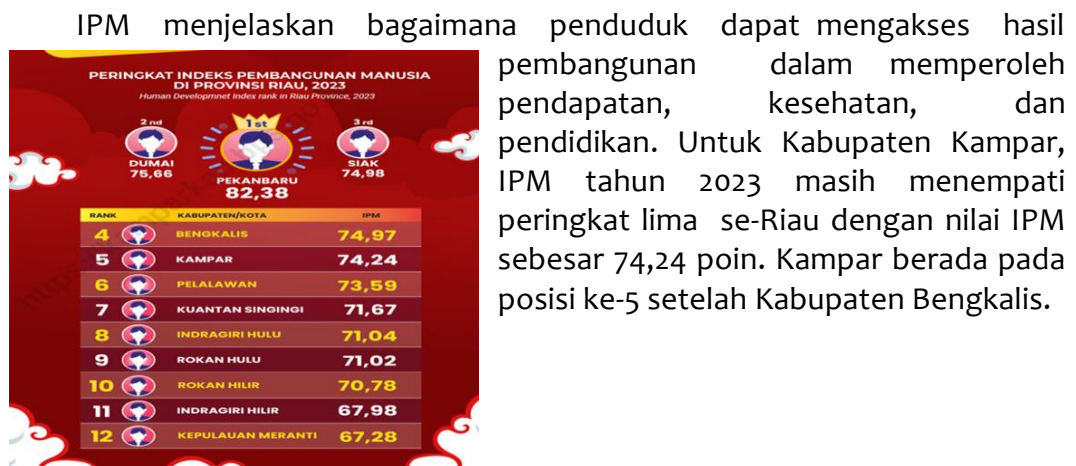
### 1. CAPAIAN MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:

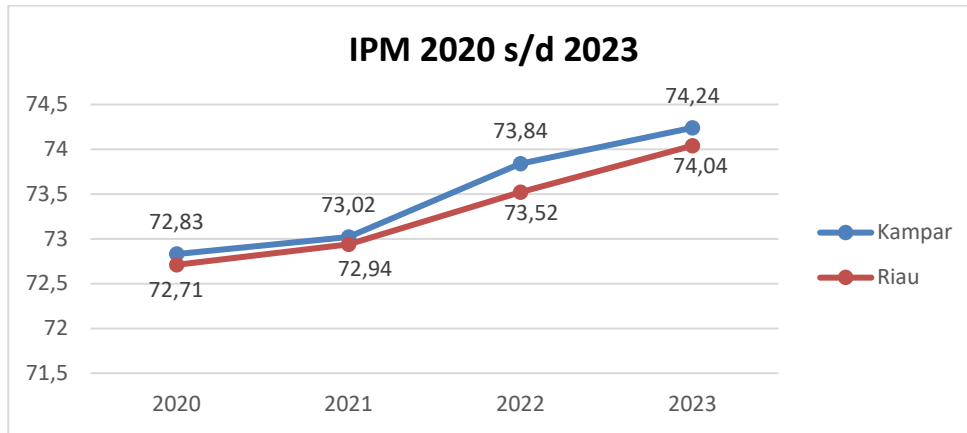
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,84	74,24	0.542
2	Angka Kemiskinan	7,12	7,04	-1.124
3	Angka Pengangguran	3,62	3,38	-6.63
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.83	4,22	-12.629
5	Pendapatan Per kapita	103.55	106.929	3.263
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,311	0,302	-2.894

Sumber data : BPS Kabupaten Kampar Tahun 2024

#### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



## IPM Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2023



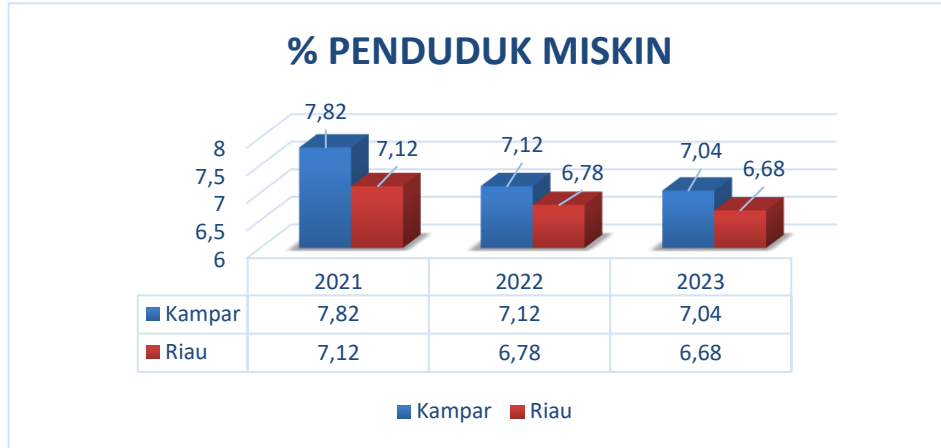
### B. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Kabupaten Kampar berada pada 7,04 persen dengan jumlah penduduk miskin 63.84 ribu jiwa dengan data sebagai berikut :

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	375.716	67,68	8,38
2017	398.138	66,33	8,02
2018	419.306	69,32	8,18
2019	434.601	66,81	7,71
2020	460.991	65,3	7,38
2021	477.603	68,74	7,82
2022	502.670	63,55	7,12
2023	547.696	63,84	7,04

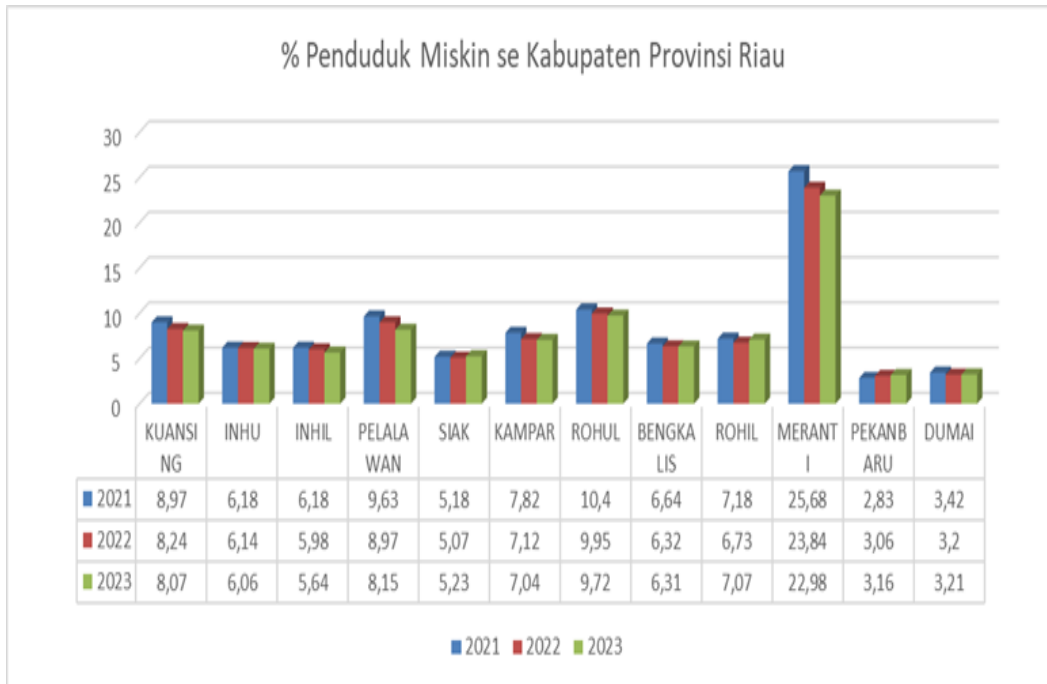


**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kampar dengan Provinsi Riau  
Tahun 2021 s/d 2023**



Sumber data : BPS Kabupaten Kampar 2024

**Persentase Penduduk Miskin se Kabupaten Provinsi Riau, 2021-2023**



Sumber data : BPS Kabupaten Kampar 2024

### C. Angka Pengangguran

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih, Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{PENCARI KERJA}}{\text{ANGKATAN KERJA}} \times 100\%$$

#### Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Kabupaten Kampar

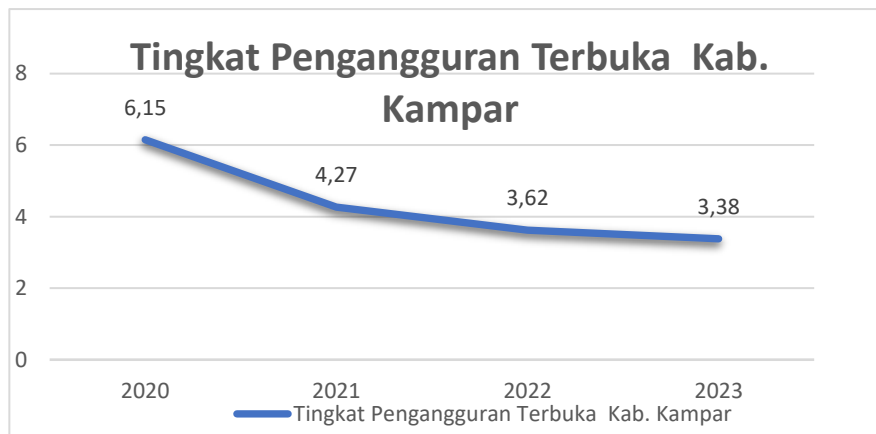
Pendidikan Tertinggi	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
1	2	3	4	5
0	99.887	1.860	97.747	98,10
1	88.821	1.140	89.961	98,73
2	144.21	9.102	153.723	94,08
3	40.229	821	41.120	98,00
<b>Jumlah</b>	<b>369.299</b>	<b>12.923</b>	<b>382.551</b>	<b>96,62</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Kampar 2024

Maka TPT Kabupaten Kampar Tahun 2023 :

$$TPT = \frac{12.923}{382.551} \times 100\% = 3,38\%$$

## Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kampar tahun 2020 – 2023



### D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. PDRB juga dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari hasil perhitungan PDRB Kabupaten Kampar dapat diketahui besarnya laju pertumbuhan dan struktur ekonomi Kabupaten Kampar. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kampar (persen) dari 4.83 persen pada tahun 2022 menjadi 4.22 persen pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantan Singingi	4,58	1,01	3,75	4,75	2,87
Indragiri Hulu	3,78	-0,12	4,26	4,63	4,39
Indragiri Hilir	4,16	0,43	4,46	5,25	3,17
Pelalawan	3,87	2,25	4,07	4,39	4,69
Siak	1,47	-0,1	2,31	3,78	4,35
Kampar	3,86	-0,9	3,45	4,83	4,22
Rokan Hulu	4,92	1,52	4,98	5,02	4,12
Bengkalis	-1,89	-3,3	0,51	2,22	2,77
Rokan Hilir	0,65	-0,99	1,63	2,64	2,83

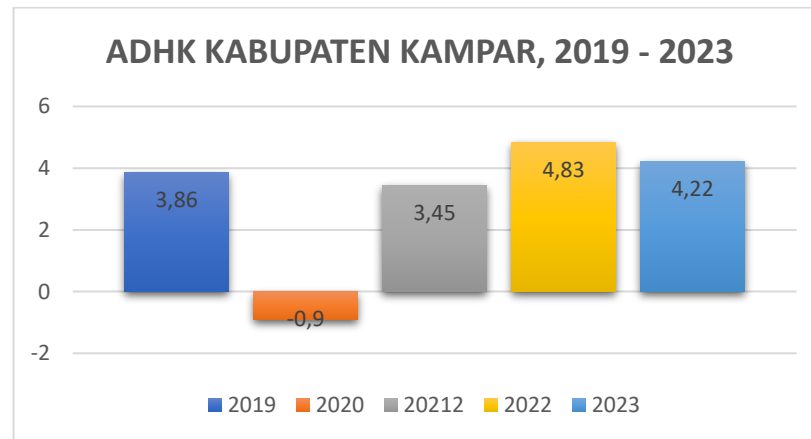
Kepulauan Meranti	2,64	0,43	2,56	3,17	4,81
Pekanbaru	5,99	-4,41	5,24	6,78	6,06
Dumai	5,60	-1,04	5,98	6,36	6,05
Riau	<b>2,81</b>	<b>-1,13</b>	<b>3,36</b>	<b>4,55</b>	<b>4,21</b>

Sumber Data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2024

### Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2019-2023 (Persen)

PDRB	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	100	100	100	100	100
ADHK	3,86	-0,90	3,45	4,83	4,22

Sumber Data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2024



### E. Pendapatan Per kapita

Apabila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kampar (milyar rupiah), sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel dalam periode 2022-2023, maka telah terjadi kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Kampar dari Rp. 103.549,57 Milyar pada tahun 2022 menjadi Rp. 106.928,99 Milyar pada tahun 2023. Artinya Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kampar pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.379,42 Milyar. PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2350,65 Milyar, dapat dilihat pada tabel berikut :

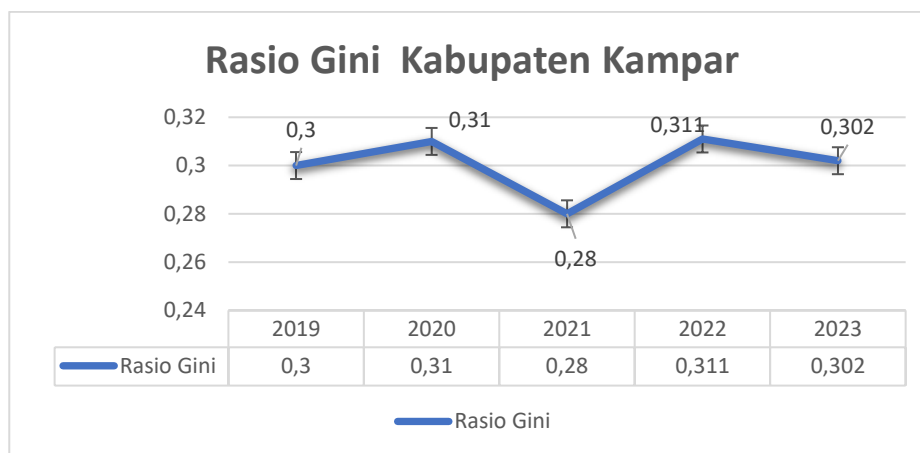
PDRB	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	77 276,15	73 001,80	86 455,98	103.549,57	106.928,99
ADHK	51 888,83	51 419,30	52 419,86	55.765,14	58.116,51

Sumber Data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2024

#### F. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar didapati adanya penurunan nilai koefisien gini sebesar 2,89 poin dengan nilai rasio gini tahun 2022 sebesar 0,311 menjadi 0,302 di tahun 2023. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Kampar masih berada pada kriteria/kategori ketimpangan “moderat”. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

#### Indek Gini Rasio Kabupaten Kampar Tahun 2019 -2023



## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar Kabupaten Kampar Tahun 2023 sebagai berikut :

## A. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

- **Capaian Kinerja Outcome**

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pendidikan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
OPD : Dinas Pendidikan				
1.	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	47.221	54,264
2.	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97.785	94,030
3.	1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98.572	84,031
4.	1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	82.969	71,10

- **Realisasi Belanja Urusan Pendidikan**

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA TAHUN 2023		
NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	873.441.793.931,00	850.907.617.221,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	863.811.315.141,00	841.682.432.951,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	572.112.414.320	554.941.637.983
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	366.353.000	275.319.027
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	282.485.300	212.469.127
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.867.700	62.849.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>565.097.700.292</b>	<b>548.505.249.544</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	565.046.324.292	548.455.477.644
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.776.000	32.174.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.800.000	8.800.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.800.000	8.797.400
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>240.249.850</b>	<b>214.960.000</b>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	240.249.850	214.960.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.455.071.286</b>	<b>1.339.458.153</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.764.000	68.848.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.330.000	52.250.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.022.936	51.938.550
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	599.526.800	599.526.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.348.000	205.383.803
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.079.550	361.511.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.690.394.280</b>	<b>4.407.102.959</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.746.340	264.003.869
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	859.929.500	849.834.100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.505.718.440	3.293.264.990
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>262.645.612</b>	<b>199.548.300</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	262.645.612	199.548.300

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>291.029.816.171</b>	<b>286.129.104.518</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>180.668.533.528</b>	<b>177.382.213.609</b>
Penambahan Ruang Kelas Baru	2.012.788.923	1.739.012.122
PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	705.416.000	705.416.000
PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	626.769.000	626.769.000
PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	349.124.000	349.124.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	31.082.025.300	29.025.348.780
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.033.697.270	10.861.238.950
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	-	-
REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	191.730.000	191.730.000
Pengadaan Mebel Sekolah	2.345.659.000	2.097.783.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.130.532.000	2.097.314.040
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	192.459.050	184.607.050
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	431.914.400	431.563.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	371.055.350	366.953.500
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	34.291.707.612	33.860.040.172
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	152.239.750	151.034.090
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.122.205.873	93.065.069.905
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.342.000	57.342.000
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.571.868.000	1.571.868.000



<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>87.884.769.623</b>	<b>86.763.328.740</b>
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.565.107.200	1.423.336.000
PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	470.716.000	470.716.000
PEMBANGUNAN LABORATORIUM	3.983.447.050	3.983.447.050
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.752.234.240	8.490.661.240
Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah	3.632.623.670	3.583.169.750
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH	-	-
REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM	-	-
Pengadaan Mebel Sekolah	831.003.000	788.451.468
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	757.332.000	747.764.440
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	516.873.500	511.397.050
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	588.952.250	574.046.570
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	267.628.600	264.715.617
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.850.371.664	28.465.707.838
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	338.935.500	139.365.000
Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	37.281.088.949	37.272.308.717
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48.456.000	48.242.000
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG TU	-	-
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KEPALA SEKOLAH	-	-
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>18.538.908.720</b>	<b>18.088.253.430</b>
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	509.848.400	477.344.000

PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	1.927.244.320	1.698.109.200
Pengadaan Mebel PAUD	15.008.000	14.994.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	862.872.000	858.670.330
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	677.575.000	674.138.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	504.830.000	485.181.500
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.681.797.000	1.681.773.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	852.879.100	843.092.500
Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.433.000.000	11.298.536.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	73.854.900	56.414.900
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>3.937.604.300</b>	<b>3.895.308.739</b>
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	163.870.700	138.448.589
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	143.025.350	142.820.800
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	212.513.500	211.610.750
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	97.297.250	97.190.100
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.203.000.000	3.203.000.000
PENYELENGGARAAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	117.897.500	102.238.500
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>559.214.850</b>	<b>549.316.050</b>
<b>PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR</b>	<b>431.394.200</b>	<b>430.182.100</b>
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	214.017.950	213.724.250
PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	217.376.250	216.457.850

<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>127.820.650</b>	<b>119.133.950</b>
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	127.820.650	119.133.950
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>109.869.800</b>	<b>62.374.400</b>
<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>109.869.800</b>	<b>62.374.400</b>
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.970.800	62.374.400
Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.899.000	-

- **Permasalahan yang dihadapi**

1. Masih terdapatnya anak putus sekolah khususnya tingkat pendidikan menengah.
2. Masih kurangnya aparatur yang Profesional
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan.
4. Masih lemahnya sistem manajemen dan pengawasan pendidikan.
5. Masih kurangnya inventarisasi peninggalan situs-situs budaya dan belum optimalnya promosi nilai-nilai budaya.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah di setiap jenjang pendidikan dan pendidikan luar biasa.

## B. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Kampar.

- **Capaian Kinerja Outcome**

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesehatan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
OPD : Dinas Kesehatan dan RSUD Kampar				
1.	1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.61	0,57
2.	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	14.28	100
3.	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90.94	94,48
4.	1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	85.66	91,46
5	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96.87	98,84
6	1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	78.81	86,42
7	1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83.63	98,73
8	1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	34.13	30,88
9	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65.12	70,91
10	1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.12	16,49
11	1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56.78	98,39
12	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	92.30	88,78
13	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	89.99	36,46
14	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	53.95	51,64

- Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

DINAS KESEHATAN DAN RSUD 2023		
NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>ANGGARAN DINAS KESEHATAN</b>		
<b>DINAS KESEHATAN</b>		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	793.577.200,00	648.862.390,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.656.518.382,00	107.217.588.121,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.428.000,00	38.828.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.563.116.400,00	1.356.825.083,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.168.740.755,00	6.568.198.691,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.039.459.534,00	818.371.393,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	33.353.103.963,00	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.925.733.450	17.754.953.931
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.531.148.067,00	29.244.951.875,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	421.441.000,00	381.711.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.999.317.850,00	1.799.019.581,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.733.770.550,00	9.615.719.950,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.713.797.300,00	1.040.551.538,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.081.000,00	54.988.000,00

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.335.000,00	96.385.000,00
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.116.000,00	24.166.000,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	151.057.950,00	117.151.950,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	216.181.500,00	202.531.500,00
Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.660.000,00	9.660.000,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.006.285.800	1.097.372.250
<b>RSUD Bangkinang</b>		
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.943.800,00	33.761.980,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.062.452.373,00	36.810.203.616,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	399.050.000,00	388.648.056,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.211.469.350,00	3.104.173.780,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.336.483.464,00	7.475.560.697,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	61.306.920.744,00	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.812.497.301,00	8.002.640.419,00
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	349.720.000,00	349.210.000,00

Perencanaan Pendayagunaan Kesehatan Untuk Wilayah Kabupaten/Kota	Kebutuhan Sumberdaya Manusia UKP Dan UKM Di	Dan	13.738.581.864,00	12.444.595.288,00
---	---	-----	-------------------	-------------------

- Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :
  - Sasaran program menggunakan sasaran estimasi tidak sasaran reel.
  - Masih kurang optimalnya penjangkauan laporan di faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas.
  - Permasalahan di wilayah Perusahaan yang sasaran penduduk yang sudah terdata pulang ke kampungnya.
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin :
  - Masih ada Persalinan yang belum difaskesnya.
  - Ibu bersalin yang melahirkan di daerah lain sehingga tidak terdata Sasaran program menggunakan sasaran estimasi.
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir :
  - Sasaran program menggunakan sasaran estimasi Kunjungan neonatus lengkap yang masih rendah karena masih banyaknya ibu yang melakukan persalinan di tempat yang berbeda.
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita :
  - Pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan yang belum maksimal sehingga laporan bulanan yang belum pas.
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut :
  - Belum adanya pelatihan dalam pelaksanaan homecare terhadap lansia sehingga masih ada lansia yang tidak mandiri belum bisa menghadiri posyandu lansia.
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :
  - Belum maksimalnya Alokasi dana untuk kegiatan skrining PTM dan deteksi dini hipertensi.
  - Belum semua puskesmas memiliki data yang valid tentang jumlah penderita diabetes melitus.
  - Belum maksimalnya koordinasi dengan lintas program terkait seperti promkes, Gizi, PIS-PK.
  - Kurangnya Kerjasama lintas sektor terkait Kurangnya kepedulian dan tidak adanya dukungan dari keluarga untuk pasien hipertensi.
  - Belum semua Desa mengalokasikan dana untuk Pembelian Logistik BMHP dan Honor Kader sebagai penunjang kegiatan skrining PTM di POSBINDU PTM.

- Pengelola program PTM terlatih di puskesmas sering berganti.
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus:
    - Belum maksimalnya alokasi dana untuk kegiatan skrining PTM dan deteksi dini diabetes melitus.
    - Belum semua puskesmas memiliki data yang valid tentang jumlah penderita diabetes melitus.
    - Belum maksimalnya koordinasi dengan lintas program terkait seperti promkes, Gizi, PIS-PK.
    - Kurangnya Kerjasama lintas sector
    - Kurangnya kepedulian dan tidak adanya dukungan dari keluarga untuk pasien Diabetes Melitus.
    - Belum semua desa mengalokasikan dana untuk Honor Kader sebagai penunjang kegiatan skrining PTM di POSBINDU PTM
  8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat :
    - Belum maksimalnya alokasi dana untuk kegiatan skrining dan deteksi dini GME dan gangguan jiwa
    - Belum maksimalnya koordinasi dengan lintas program terkait seperti promkes, dan PIS-PK
    - Belum semua Desa mengalokasikan dana untuk Honor Kader jiwa
    - Puskesmas yang telah pelatihan Deteksi Dini Gangguan Jiwa belum mengaktifkan poli jiwanya untuk mendeteksi dini GME dan pasien dengan gangguan jiwa
    - Rendahnya kepedulian masyarakat dan lintas sector terkait baik di Kecamatan dan Desa untuk pendataan dan pengobatan pasien ODGJ
    - Sebagian besar keluarga pasien ODGJ malu dan kurang/tidak peduli dengan pengobatan pasien ODGJ
    - Pengelola program keswa terlatih di puskesmas sering berganti
  9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis:
    - Keterlibatan Pemda Kurang dalam Program TB, Karena selama ini program TB di dukung oleh anggaran dana Hibah GF (Global Found)



### C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

- **Capaian Kinerja Outcome**

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
OPD : Dinas PUPR Kabupaten Kampar				
1.	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Wilayah sungai di Kabupaten Kampar sudah menjadi kewenangan pusat berdasarkan Permen PUPR No 4/PRT/M/2015 ttg Kriteria dan penetapan wilayah sungai	
2.	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Wilayah sungai di Kabupaten Kampar sudah menjadi kewenangan pusat berdasarkan Permen PUPR No 4/PRT/M/2015 ttg Kriteria dan penetapan wilayah sungai	
3.	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,04	69,04
4.	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	52,56	53,06
5	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	51,93	52,35
6	1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	62,16	61,14
8	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	99,2	85,08
9	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

- **Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

<b>DINAS PUPR 2023</b>		
<b>NAMA PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>ANGGARAN DINAS PUPR</b>		
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	589.939.350,00	548.895.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.161.764.726,00	9.926.525.206,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.000.000,00	12.627.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.849.733.250,00	2.611.054.941,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	949.400.000,00	832.900.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.423.624.000,00	1.292.405.693,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.493.458.200,00	1.143.801.578,00
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.032.181.100,00	5.277.053.045,00
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	2.625.760.000,00	2.553.721.176,00
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.402.465.000,00	3.113.813.180,00
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.423.009.367,00	13.501.313.041,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	56.007.779.821,00	50.454.303.669,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	210.504.312.331,00	166.993.442.512,00

- **Permasalahan Yang Dihadapi**

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam menjalankan program kinerjanya antara lain :

1. Anggaran untuk infrastruktur masih terbatas apabila dibandingkan dengan banyaknya cakupan wilayah kerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur baik jalan maupun jembatan.
2. Belum Lengkapnya Data dan Informasi Terkait Tata Ruang Wilayah.
3. Terbatasnya Forum-Forum Diskusi, Seminar, Workshop terkait Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah sehingga Sulit Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Tanah.
4. Banyaknya jumlah alat berat yang sudah tidak layak jalan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.
5. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (pegawai) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar.

- **Capaian Kinerja Outcome**

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan Rakyat	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
OPD : Dinas PERKIM Kabupaten Kampar				
1.	1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	0
2.	1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Tidak dilaksanakan karena tidak ada kebijakan program pemerintah yang menyebabkan relokasi perumahan/per mukiman	

3.	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	0
4.	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.95	37,09
5	1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	2.61	35,20

- **Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat**

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 2023		
NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>ANGGARAN DINAS PERKIM</b>		
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.033.600,00	220.957.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.542.289.782,00	3.416.371.251,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.996.000,00	29.723.400,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.047.601,00	459.566.335,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	538.350.000,00	518.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.328.000,00	919.817.900,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.009.195,00	445.524.057,00
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	281.853.300,00	265.132.850,00
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	281.853.300,00	265.132.850,00
Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	583.300.100,00	524.104.179,00
Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	308.499.950,00	302.959.889,00
Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	187.925.000,00	177.877.000,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	167.631.800,00	167.267.300,00

Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	20.806.552.100,00	20.617.476.200,00
Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	27.459.205.889,00	27.402.474.500,00
Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Kecil	202.567.100,00	187.828.400,00

- **Permasalahan Yang Dihadapi**

Berbagai permasalahan maupun isu-isu dan Solusi yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar antara lain :

1. Terbatasnya dana untuk bedah rumah
2. Masih banyaknya pemukiman kumuh yang belum terjangkau
3. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
4. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas Pemukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan Pemukiman;
5. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Pemukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
6. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/ perlengkapan, perencanaan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
7. Melaksanakan Tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP, Damkar dan BPBD Kabupaten Kampar.

- **Capaian Kinerja Outcome**

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Tarnstribummas	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
OPD : Satpol PP				
1.	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2.	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
OPD : BPBD				
4.	1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
	1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80.64	0,02
	1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
OPD : DAMKAR				
	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	76.53	71,94
	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,25	7,13

- **Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**

URUSAN TRANTIBUMMAS 2023		
NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
SATPOL PP		
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.400,00	3.462.050,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.678.792.910,00	3.558.039.971,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.345.000,00	101.267.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.682.650,00	742.259.350,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.490.273.484,00	8.368.185.621,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.928.925,00	686.025.860,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.657.539.550,00	1.634.442.267,00
<b>BPBD</b>		
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.991.000,00	147.291.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.102.482.920,00	3.817.026.814,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.824.000,00	13.700.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	821.257.000,00	553.741.951,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	478.301.252,00	400.740.650,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854.827.600,00	803.871.900,00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	745.782.500,00	620.833.980,00
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.155.300.215,00	4.102.506.615,00
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	531.470.000,00	443.160.930,00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	64.839.700,00	24.093.636,00
<b>DAMKAR</b>		
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	366.089.750,00	255.030.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.304.539.496,00	3.138.919.254,00
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	16.260.000,00	14.396.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.768.220,00	149.044.220,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.630.673.117,00	1.573.289.074,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	546.092.560,00	536.175.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.196.591.588,00	8.058.068.202,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.644.506.500,00	2.635.934.100,00

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.155.438.030,00	1.132.038.772,00
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	59.826.500,00	53.188.000,00
Investigasi Kejadian Kebakaran	34.817.000,00	34.656.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	311.952.100,00	271.962.395,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	289.838.560,00	277.019.486,00

- **Permasalahan Yang Dihadapi**

- ✚ Satpol PP

Beberapa hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2023 :

- ✓ Pelaksanaan Kegiatan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dalam pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni :
  1. Kurangnya Fasilitas pendukung baik secara fisik maupun sumber daya manusia;
  2. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal peraturan daerah, keputusan kepala daerah terutama koordinasi perkara yang ditangani oleh PPNS yang notabene sebagai penyidik beberapa kasus terutama pelanggaran yang dilakukan perorangan, badan hukum dan objek hukum lainnya;
  3. Masalah anggaran dirasa sangat kurang, mengingat semua kegiatan berada di lapangan
- ✓ Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan Tim YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar antara lain :
  1. Masih rendahnya jumlah personil PPNS dan terbatasnya
  2. Kemampuan penyidik PPNS dalam Kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar;
  3. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Kab. Kampar;
  4. Terbatasnya sarana dan Prasarana untuk menunjang Kegiatan



Operasional Kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Ka. Kampar.

 Damkar

1. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat atau masih banyak indikator kinerja yang berorientasi pada output kegiatan, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya;
2. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan- kelemahan, hal ini menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar

 BPBD

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kab. Kampar antara lain :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia dalam Penanggulangan Bencana baik dari sisi administarasi maupun lapangan
2. Terbatasnya peralatan dalam pananganan bencana

**F. URUSAN SOSIAL**

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

• **Capaian Kinerja Outcome**

No	No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
OPD : Dinas Sosial Kabupaten Kampar				
1.	1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	73.21	1.097,9
2.	1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

- **Realisasi Belanja Urusan Sosial**

<b>URUSAN SOSIAL 2023</b>		
<b>NAMA PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>ANGGARAN DINAS SOSIAL</b>		
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.874.750,00	381.088.550,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.375.663.072,00	3.271.004.699,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	954.329.000,00	882.479.514,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.413.786.000,00	1.314.515.450,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.504.922,00	1.103.741.930,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.203.200,00	882.176.924,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.226.619.450,00	3.161.857.689,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1.112.158.900,00	1.044.443.308,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	312.327.900,00	277.882.600,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	682.453.580,00	647.684.120,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	125.205.000,00	99.560.400,00
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	664.905.000,00	637.024.672,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	683.917.600,00	647.742.426,00

- **Permasalahan Yang Dihadapi**

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang di Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota tidak di cairkan karena masih ada permakanaan dan sandang buffer stock dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Riau.

### 3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

#### a. Hasil EPPD Kabupaten Kampar

TAHUN	DASAR	SKOR	STATUS
2021	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tanggal 18 April 2023	2,15	RENDAH
2022	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-6646 Tahun 2023 Tanggal 21 Desember 2023	3,0367	SEDANG

#### b. Hasil Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

TAHUN	DASAR HASIL PEMERIKSAAN BPK NOMOR	PREDIKAT
2016	11.A/LHP/VIII.PEK/05/2017 TANGGAL 28 Mei 2017	WTP
2017	13.A/LHP/VIII.PEK/05/2018 TANGGAL 25 Mei 2018	WTP
2018	24.A/LHP/VIII.PEK/05/2019 TANGGAL 22 Mei 2019	WTP
2019	150.A/LHP/VIII.PEK/06/2020 TANGGAL 23 Juni 2020	WTP
2020	143/S-HP/VIII.PEK/04/2021 TANGGAL 30 April 2021	WTP
2021	172/S-HP/VIII.PEK/05/2022 TANGGAL 13 Mei 2021	WTP
2022	162/B/S-HP/VIII.PEK/06/2023 TANGGAL 12 Juni 2023	WTP

#### 4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Target Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 2.805.811.127.502,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.734.805.625.683,08 atau mencapai 97,47 persen. Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
I	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.805.811.127.502,00</b>	<b>2.734.805.625.683,08</b>	<b>97,47</b>	
1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>285.540.731.945,00</b>	<b>298.626.546.420,08</b>	<b>104,58</b>	<b>260.225.610.592,71</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	156.820.690.967,00	153.800.441.758,00	98,07	142.366.052.600,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	13.505.450.000,00	12.315.324.270,00	91,19	8.917.742.152,31
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815,00	36.299.309.804,00	155,97	23.550.128.300,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.941.282.163,00	96.211.470.588,08	104,64	85.391.687.540,40
2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.518.170.395.557,00</b>	<b>2.434.058.392.989,00</b>	<b>96,66</b>	<b>2.165.922.257.436,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.221.270.991.417,00	2.133.499.528.840,00	96,05	220.298.670.324,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	296.899.404.140,00	300.558.864.149,00	101,23	180.695.925.247,00
3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.120.686.274,00</b>	<b>100,99</b>	<b>1.360.712.174,00</b>
	Pendapatan Hibah	2.100.000.000,00	2.120.686.274,00	100,99	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.805.811.127.502,00</b>	<b>2.734.805.625.683,08</b>	<b>97,47</b>	<b>2.427.503.585.552,71</b>

Untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dari Anggaran sebesar Rp. 298.626.546.420,08 dari Rp. 285.540.731.945,00 atau mencapai 104,58%, sementara realisasi yang tertinggi bersumber dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari anggaran sebesar Rp. 23.273.308.815,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.299.309.804,00 dengan persentase sebesar 155,97% selanjutnya realisasi terendah yaitu dari Pendapatan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.505.450.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 12.315.324.270,00 dengan kata lain sebesar 91,19 %.

URAIAN REKENING	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI 2022
	ANGGARAN	REALISASI	%	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.826.856.579.502,00</b>	<b>2.619.085.368.819,00</b>	<b>92,65</b>	<b>2.480.592.185.573,96</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.047.129.480.192,00</b>	<b>1.900.788.573.608,50</b>	<b>92,85</b>	<b>1.818.618.607.702,14</b>
Belanja Pegawai	1.020.218.954.429,00	936.576.698.454,00	91,79	963.391.408.176,00
Belanja Barang dan Jasa	910.545.958.029,00	849.562.750.223,45	93,30	787.240.777.384,22
Belanja Subsidi	550.000.000,00	122.000.000,00	22,18	436.450.000,00
Belanja Hibah	103.269.017.734,00	102.175.874.903,05	98,94	47.872.957.141,92
Belanja Bantuan Sosial	12.545.550.000,00	12.351.250.028,00	98,45	19.677.015.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>384.479.758.418,00</b>	<b>324.522.994.637,50</b>	<b>84,41</b>	<b>281.509.813.581,82</b>
Belanja Modal Tanah	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.228.102.376,00	54.246.432.888,50	91,59	80.023.194.214,82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.376.516.079,00	55.491.835.674,00	82,36	64.626.802.305,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	242.693.872.952,00	200.185.637.334,00	82,48	127.694.277.285,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.821.693.011,00	13.242.462.641,00	95,81	8.660.421.281,00
Belanja Modal Aset Lainnya	239.295.000,00	238.882.170,00	99,83	
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.448.219.800,00</b>	<b>66.645.582,00</b>	<b>4,60</b>	<b>846.120.950,00</b>
Belanja Tidak Terduga	<b>1.448.219.800,00</b>	<b>66.645.582,00</b>	<b>4,60</b>	846.120.950,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>393.799.121.092,00</b>	<b>393.707.154.991,00</b>	<b>99,98</b>	<b>379.617.643.340,00</b>
Belanja Bagi Hasil	16.813.266.012,00	16.808.319.340,00	99,97	10.423.785.747,00

URAIAN REKONING	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI 2022
	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Bantuan Keuangan	376.985.855.080,00	376.898.835.651,00	99,98	369.193.857.593,00
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(21.045.452.000,00)</b>	<b>115.720.256.864,08</b>	<b>4,82</b>	<b>(53.088.600.021,2)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>21.045.452.000,00</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>103,45</b>	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.045.452.000,00</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>103,45</b>	<b>74.859.762.812,21</b>
Penggunaan SILPA				74.859.762.812,21
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				0,00
Pembiayaan Netto	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,45	74.859.762.812,21

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.619.085.368.819,00 atau 92,65 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.826.856.579.502,00 dimana terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp. 207.771.210.683,00. Realisasi belanja Tahun 2023 lebih besar bila dibanding dengan realisasi belanja pada tahun 2022.

Pembiayaan Daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan atau untuk menampung surplus anggaran. Terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sepenuhnya masih mengandalkan saldo lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran pembiayaan selain untuk mengangsur beban utang yang masih ada, dialokasikan juga untuk menumbuh kembangkan perusahaan daerah melalui penyertaan modal.

Anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 21.045.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.771.162.790,96 (103,45%), dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 21.045.452.000,00 dengan realisasi Rp. 21.771.162.790,96 (103,45%), perolehan penerimaan pembiayaan ini didapat dari Pembiayaan Netto.

## 5. INOVASI DAERAH

Inovasi yang telah dibuat Kabupaten Kampar untuk meningkat kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas, dan digitalisasi Pelayanan, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INOVASI YG ADA DI BAPPEDA	INOVASI YANG DI SK BUPATI	INOVASI YANG	INOVASI YANG DI LOMBAKAN DI
		TAHUN 2023	MASIH AKTIF	TINGKAT NASIONAL (IGA TH 2023)
1	80	64	64	18

### DAFTAR NAMA INOVASI KABUPATEN KAMPAR YANG MENGIKUTI PENGHARGAAN INNOVATION GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGUSUL	KEMATANGAN	KET
1	PPDB (PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU) ONLINE	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	81	
2	OCU MAPAN (OPTIMALISAI CARA UNTUK MANDIRI PANGAN)	DINAS KETAHANAN PANGAN	81	
3	TRACKING SI CANTIK	DMPTSP	94	
4	GEMILANG ( GERAKAN MENGISI WAKTU LUANG) BERSAMA FORUM ANAK KAMPAR (FAKAR) MELALUI KEGIATAN BCA, AKAR BAHAR, GELAK, LASKAR DAN GEBRAK	KB	93	
5	APLIKASI SIMPAD	BAPENDA	95	
6	SIDAQ (SISTEM INFORMASI DATABASE PERIZINAN QR CODE)	DMPTSP	102	
7	INOVASI E-PAYMENT SIBERES (E-PAYMENT SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN RETRIBUSI)	DMPTSP	102	
8	INFO LA CU (INFORMASI LAYANAN CEPAT BERUSAHA)	DMPTSP	96	
9	PELAYANAN SATU HATI (SYARAT LENGKAP SATU HARI TERBIT IZIN)	DMPTSP	102	
10	ASMARA (ANTAR, SERAHKAN MEDIKASI, ANDA DI RUMAH SAJA)	RSUD	94	
11	GELIAT KAMU (GERAKAN LITERASI UNTUK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	107	

	KESEJAHTERAAN KAMPAR MAJU)			
12	GERBANGKU (GERAKAN MENYUMBANG BUKU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	101	
13	ONE VILLAGE ONE LIBRARY (SATU DESA SATU PUSTAKA)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	98	
14	LAPOR OCU (LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI UNTUK MEWUJUDKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS ONLINE, CEPAT, DAN MUDAH)	DINAS PERHUBUNGAN	78	
15	E-WARTAWAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96	
16	E-OFFICE DSIKOMINFO (ABSENSI DIGITAL)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	88	
17	E-SKM (ELEKTRONIK SURVEY KEPUJASAN MASYARAKAT)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89	
18	SATU DATA KAMPAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89	
	TOTAL		1686	

## PENGHARGAAN TAHUN 2023 :

- KEGIATAN INOVASI “INAGARA AWARD” TAHUN 2023** bagi Pemerintah Daerah mitra Kegiatan Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara .

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) 3868201-9, Fax. (021) 3800187

Nomor : 5799 / P.1 / KPTA.01.1  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Pemerinta INAGARA AWARD Tahun 2023  
Jakarta, 2 Agustus 2023

Yth. Daftar Telampir di tempat.


Sehubungan dengan pemberian INAGARA AWARD Tahun 2023 bagi Pemerintah Daerah mitra kegiatan Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara, dengan ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Setelah menelaah kiriman bukti-bukti (*evidences*) kegiatan/aktivitas pengembangan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pasca Launching Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah pada periode Tahun 2022-2023, maka 9 (sembilan) pemerintah daerah dari 10 (sepuluh) pemerintah daerah nominator, dinyatakan dapat menerima INAGARA AWARD Tahun 2023. Kesembilan Pemerintah Daerah penerima INAGARA AWARD Tahun 2023 tersebut adalah:
  - Pemerintah Kabupaten Bhukumba
  - Pemerintah Kabupaten Kampar
  - Pemerintah Kabupaten Kendal
  - Pemerintah Kabupaten Kerinci
  - Pemerintah Kabupaten Nias Utara
  - Pemerintah Kabupaten Merauke
  - Pemerintah Kabupaten Tebo
  - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
  - Pemerintah Kota Tanjungbalai
- Sehubungan dengan padatnya acara serta keterbatasan tempat dan waktu yang tersedia, maka hanya 5 (lima) dari sembilan Pemerintah Daerah yang akan diundang untuk hadir secara langsung menerima INAGARA AWARD Tahun 2023 di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, yaitu Pemerintah Kabupaten Bhukumba, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kabupaten Nias Utara, dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Untuk 4 (empat) Pemerintah Daerah lainnya, penghargaan INAGARA AWARD Tahun 2023 akan dikirimkan ke alamat masing-masing Pemerintah Daerah.
- Acara pemberian INAGARA AWARD Tahun 2023, direncanakan akan berlangsung pada Hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, bertempat di Aula Agus Dwyanto, Kantor LAN-RI, Jalan Veteran no. 10 Jakarta, bersamaan dengan kegiatan pemberian penghargaan-penghargaan lainnya. Untuk informasi dapat menghubungi Sdr. Antun Nastri Sidik (081212083459)/Rahayu Eka Putri (087821215588).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wahyu Utomo

Tembusan:  
Kepala LAN RI





## 2. PENGHARGAAN LAINNYA

Pada tahun 2023 Kabupaten Kampar memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. Menerima penghargaan terbaik Peringkat 1 Kategori Kinerja Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa terbaik tahun 2022 pada Tanggal 16 Januari 2023.
2. Menerima Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang langsung diserahkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023;
3. Award 2023 Atas Komitmennya Untuk Ikut Menjaga Kemerdekaan Pers di Riau dan Membantu Memelihara Iklim Industri Pers Yang Sehat Dan Profesional Pada Tanggal 28 Februari 2023;
4. Menerima penghargaan terbaik II kinerja Lelang Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 28 februari 2023;
5. Mendapatkan Penghargaan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Award 2023 atas komitmennya untuk ikut menjaga kemerdekaan Pers di Riau dan membantu memelihara iklim industri pers yang sehat dan profesional pada tanggal 28 Februari 2023.
6. Menerima Piagam penghargaan terbaik pertama kategori kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Riau yang diserahkan oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si pada tanggal 3 April 2023;
7. Menerima 3 Penghargaan Dalam Pemulihan Dan Penertiban Aset Tahun 2022 Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dari 27 Perumahan, Kategori Pemulihan Dan Penerbitan Aset Tahun 2022 Berupa Rumah Dinas, Dan Kategori Survei Penilaian Integritas (SPI) Indek SPI Pada Tanggal 24 Mei 2023.
8. Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 yang Merupakan WTP yang ke-7, pada tanggal 14 juni 2023.
9. Menerima Penghargaan Pemenang Lomba Juara I SDGs Desa Tingkat Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Untuk Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Pada Tanggal 27 Juli 2023;

10. Menerima Penghargaan Dari Gubernur Riau Atas Prestasi Penurunan Stunting Yang Signifikan Sebesar 11,2% Dari Sebelumnya 25,7% Menjadi 14,5% Pada Tanggal 31 Juli 2023.
11. Meraih Menerima Penghargaan Lencana Wira Bangun Desa Atau Upaya Dan Kerja Keras Dalam Memajukan Dan Memandirikan Desa Tahun 2023 Dari Gubernur Riau Pada Tanggal 9 Agustus 2023.
12. Menerima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Dari Mendagri Dalam Lomba Desa Tingkat Nasional Untuk Desa Koto Mesjid Kecamatan Xiii Koto Kampar Pada Tanggal 15 Agustus 2023;
13. Meraih dua penghargaan yaitu juara satu Video Edukasi Qris se Provinsi Riau dan juara terfavorit edukasi Qris se Provinsi Riau pada tanggal 20 Agustus 2023;
14. Meraih Piagam Penghargaan UHC Dengan Persentase 97,70% yang diserahkan Oleh Gubernur Riau Dan Dirut BPJS, Pada Tanggal 16 Oktober 2023;
15. Hasil Penilaian Desa Antikorupsi, KPK RI Umumkan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII koto Kampar Kabupaten Kampar, Raih Nilai 94 dengan Kategori Istimewa Pada Tanggal 19 Oktober 2023;
16. Menerima Penghargaan Kategori Kelembagaan Mal Pelayanan Publik (MPP) & Klinik LKPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2023, Juara ke III tanggal 31 Oktober 2023;
17. Meraih Penghargaan Pertama dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI atas Komitmen Bangun dan Majukan Desa Pada Tanggal 02 November 2023;
18. Meraih Juara I Apresiasi Bunda Paud Nasional Tahun 2023 Kategori Kabupaten Non Tertinggal, drg. Yusi Katakan Persembahan Terbaik Untuk Para Pendidik Paud Dan SD Kelas Awal Di Kabupaten Kampar Pada Tanggal 08 November 2023;
19. Berhasil meraih Piagam penghargaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kategori Madya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau tanggal 1 Desember 2023;
20. Memperoleh predikat sebagai Kabupaten peduli Hak Asasi Manusia ( HAM ) tahun 2023 dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai Kabupaten/Kota peduli HAM pada tanggal 18 Desember 2023;
21. Menerima Penghargaan pada malam Puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Riau Award 2023 Kategori Informatif dengan nilai 91,65 pada tanggal 21 Desember 2023;

22. Berhasil meraih penghargaan Madya dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023, yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.
23. Menerima Penghargaan Kategori Baik Dalam Pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) pada tanggal 27 Februari 2024;

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 kami sampaikan. Kami menyadari masih terdapat kinerja atas program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan Masyarakat, sehingga kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Kampar yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi, kerja keras serta dukungan dari semua pihak, baik jajaran Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kampar, Pihak Swasta serta Masyarakat Kabupaten Kampar.

**Wassalammu'alaikum Wr Wb**

Bangkinang, 22 Maret 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,



**HAMBALI, SE., MBA.,MH**